



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran keperluan mendesak pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan wajib gaji pegawai negeri sipil, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan

- Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);
  9. Peraturan Bupati Berau Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp240.615.923.845 (dua ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.092.216.150 (dua belas miliar sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.577.997.993 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.945.709.702 (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana di maksud dalam pasal 3 hurub b direncanakan sebesar Rp3.398.384.076.155 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.774.522.191.000 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp623.861.885.155 (enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga ; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.032.468.986 (satu triliun enam ratus lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp766.150.220.304 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp692.045.573.491 (enam ratus sembilan puluh dua miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.104.675.191 (seratus empat puluh satu miliar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.732.000.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.626.571.388.650 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.643.481.158 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.764.157.732 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.323.194.421.360 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.969.328.400 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak terduga yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp20.831.235.364 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer yang dimaksud dalam pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp386.564.907.000 (tiga ratus delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.600.000.000 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan keuangan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.964.907.000 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 tidak direncanakan.

#### Pasal 12

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

#### Pasal 13

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 13 Januari 2023

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSHI MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 13 Januari 2023.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

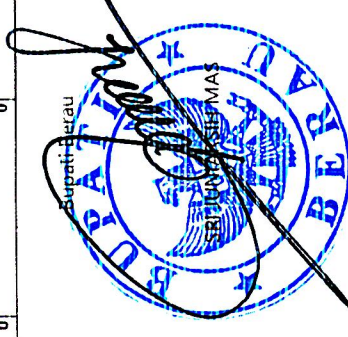
  
AGUS WAHYUDI  
03

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran I : Peraturan Bupati Berau  
 Nomor : 01  
 Tanggal : 13 Januari 2023

**KABUPATEN BERAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

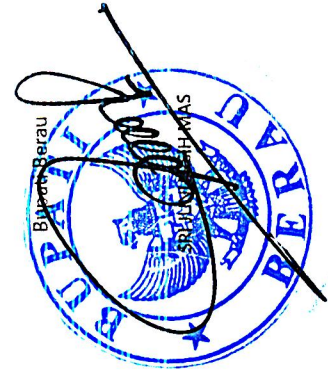
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.500.000.000	8.500.000.000	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376.964.907.000	376.964.907.000	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.964.907.000	376.964.907.000	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.964.907.000	376.964.907.000	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	376.964.907.000	376.964.907.000	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.639.000.000.000</b>	<b>3.639.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkecukupan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



**KABUPATEN BERAU**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  
 Organisasi : 2.10.000.00.01 Dinas Pertanahan

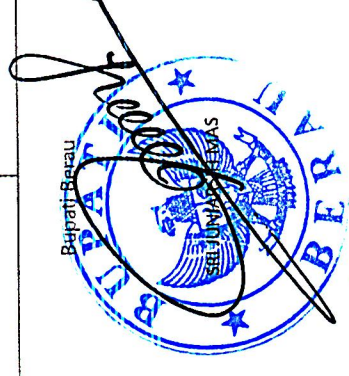
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000	175.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	175.000.000	175.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	175.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.000.000	175.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	175.000.000	175.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.300.000</b>	<b>85.300.000</b>	<b>0</b>		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.300.000	85.300.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	85.300.000	85.300.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.300.000	85.300.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000.000	40.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000	40.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.300.000	5.300.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.300.000	5.300.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	40.000.000	40.000.000	0		
2 10 2.10.000.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000	40.000.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>18.705.095.507</b>	<b>18.705.095.507</b>	<b>0</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(18.705.095.507)</b>	<b>(18.705.095.507)</b>	<b>0</b>		
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**KABUPATEN BERAU**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

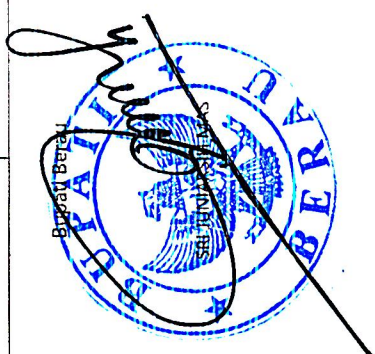
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  
 Organisasi : 3.27.000.00.02 Dinas Perkebunan

Kode Rekening	Uraian				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	01	2.09	02	5 1 02					
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02	100.000.000	100.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 01	40.500.000	40.500.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 01 01	40.500.000	40.500.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 02	14.500.000	14.500.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 02 01	14.500.000	14.500.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 03	45.000.000	45.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	02	5 1 02 03 02	45.000.000	45.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	06		14.900.000	14.900.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	06	5 1	14.900.000	14.900.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	06	5 1 02	14.900.000	14.900.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	06	5 1 02 03	14.900.000	14.900.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	06	5 1 02 03 02	14.900.000	14.900.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	10		25.000.000	25.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	10	5 1	25.000.000	25.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	10	5 1 02	25.000.000	25.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	10	5 1 02 03	25.000.000	25.000.000	0		
3 27 3.27.000.00.02.0000	01	2.09	10	5 1 02 03 03	25.000.000	25.000.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>					<b>12.926.207.589</b>	<b>12.926.207.589</b>	<b>0</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>					<b>(12.926.207.589)</b>	<b>(12.926.207.589)</b>	<b>0</b>		
<b>PEMBIAYAAN</b>									
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**KABUPATEN BERAU**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan	Organisasi	Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Pegawai	9.920.000	9.920.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektiv Lainnya ASN	9.920.000	9.920.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Honorarium	9.920.000	9.920.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	40.080.000	40.080.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Barang	7.530.000	7.530.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Barang Pakai Habis	7.530.000	7.530.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Jasa	17.550.000	17.550.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Jasa Kantor	17.550.000	17.550.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	15.000.000	0		
		2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000	15.000.000	0		
			Jumlah Belanja	20.171.812.825	20.171.812.825	0		
			Total Surplus/(Defisit)	(20.171.812.825)	(20.171.812.825)	0		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
			Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		



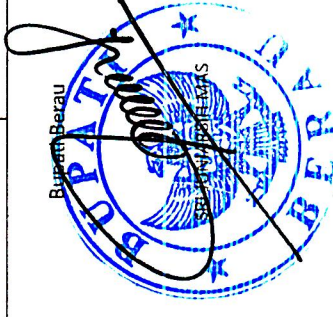
KABUPATEN BERAU

**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kemudaan dan Olahraga

Kode Rekening	Uraian				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	01	2.09	02	5 1 02 02					
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000				Belanja Jasa	4.000.000	4.000.000	0		
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000				Belanja Jasa Kantor	4.000.000	4.000.000	0		
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000				Belanja Pemeliharaan	3.000.000	3.000.000	0		
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000				Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0		
				<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.885.530.953</b>	<b>18.885.530.953</b>	<b>0</b>		
				<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(18.223.155.953)</b>	<b>(18.223.155.953)</b>	<b>0</b>		
				<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
0 00 2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00 6	<b>PEMBIAYAAN</b>					



**KABUPATEN BERAU**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN  
 Organisasi : 5.02.00.00.00.02 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa		381.240.000		381.240.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Barang		209.674.000		209.674.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		209.674.000		209.674.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa		41.566.000		41.566.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		41.566.000		41.566.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		130.000.000		130.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		130.000.000		130.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.00	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>	<b>0</b>		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		200.000.000		200.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI		200.000.000		200.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.01	Belanja Pegawai		33.240.000		33.240.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		33.240.000		33.240.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		33.240.000		33.240.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		166.760.000		166.760.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.01	Belanja Barang		11.760.000		11.760.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		11.760.000		11.760.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.02	Belanja Jasa		70.000.000		70.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		40.000.000		40.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		30.000.000		30.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		85.000.000		85.000.000	0		
5.02.5.02.00.00.02.0000.01.2.13.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		85.000.000		85.000.000	0		
	<b>Jumlah Belanja</b>		<b>18.987.528.228</b>		<b>18.987.528.228</b>	<b>0</b>		
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>71.137.471.772</b>		<b>71.137.471.772</b>	<b>0</b>		
<b>0.00.5.02.00.00.02.0000.00.0.00.00.6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

